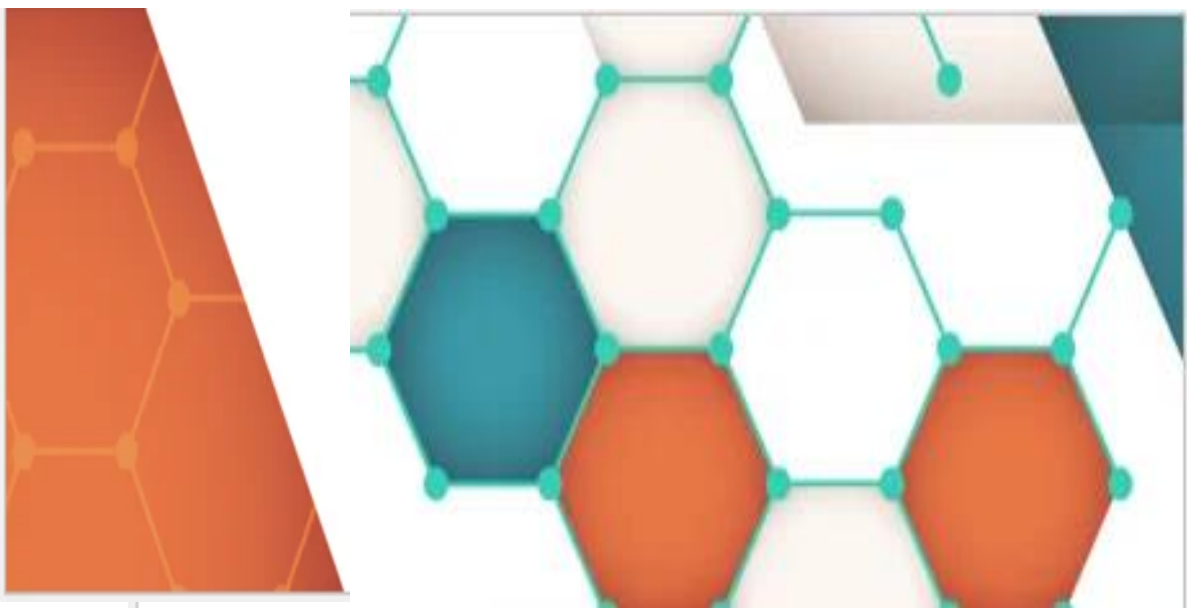


MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PUSAT KEUANGAN

---

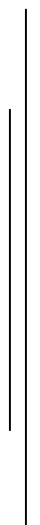
# EVALUASI CAPAIAN KINERJA SATKER PUSKEU POLRI TRIWULAN I TAHUN 2025



Jakarta, April 2025



# EVALUASI CAPAIAN KINERJA SATKER PUSKEU POLRI TRIWULAN I TAHUN 2025



Jakarta, April 2025



## EVALUASI CAPAIAN KINERJA SATKER PUSKEU POLRI TRIWULAN I TAHUN 2025

---

---

### A. PENDAHULUAN

Visi, Misi dan tujuan yang ditetapkan oleh Puskeu Polri adalah untuk mewujudkan tugas Puskeu Polri dalam menyelenggarakan fungsi keuangan dibidang pelayanan keuangan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan pembinaan Polri maupun untuk mendukung tugas-tugas Polri. Mengacu pada Visi, Misi dan tujuan Puskeu yang telah dituangkan dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Puskeu Polri Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diselaraskan dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang tersedia. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Puskeu Polri sebagai Pembina Fungsi keuangan wajib mengelola Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta merupakan hal yang menjadi prioritas utama maupun menjadi kemampuan dasar bagi pengelola keuangan di lingkungan Polri untuk mewujudkan prinsip *Good Governance*. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri berdampak pada perubahan Polri secara menyeluruh termasuk reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Penerapan reformasi anggaran yang berorientasi pada pengeluaran jangka menengah dilakukan melalui penataan kembali struktur program dan kegiatan di lingkungan Polri. Restrukturisasi program dan kegiatan bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman penerapan akuntabilitas kinerja Polri dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis Polri Tahun 2025-2029.

### B. KEDUDUKAN .....



## B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 1. Tugas

Puskeu Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri.

### 2. Fungsi

- a. pelaksana fungsi perencanaan dan evaluasi kebijakan, strategi, anggaran, sumber daya manusia dan pembinaan fungsi dalam lingkungan Puskeu Polri;
- b. pengelolaan dan administrasi pelaporan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan Non APBN;
- c. perumusan dan/atau pengembangan sistem, metode pedoman akuntansi dan keuangan Polri;
- d. pengendalian akan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan;
- e. pelaksana verifikasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di wilayah;
- f. pelaksana fungsi administrasi keuangan untuk Mabes Polri;
- g. pengelolaan informasi dan dokumentasi.

## C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Puskeu Polri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :

### 1. unsur Pimpinan:

Kapuskeu Polri.

### 2. unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:

#### a. Sekretariat (Set), terdiri dari:

- 1) Subbagren;
- 2) Subbagsumda;
- 3) Subbagbinfung; dan
- 4) Urtu.

b. Urkeu .....

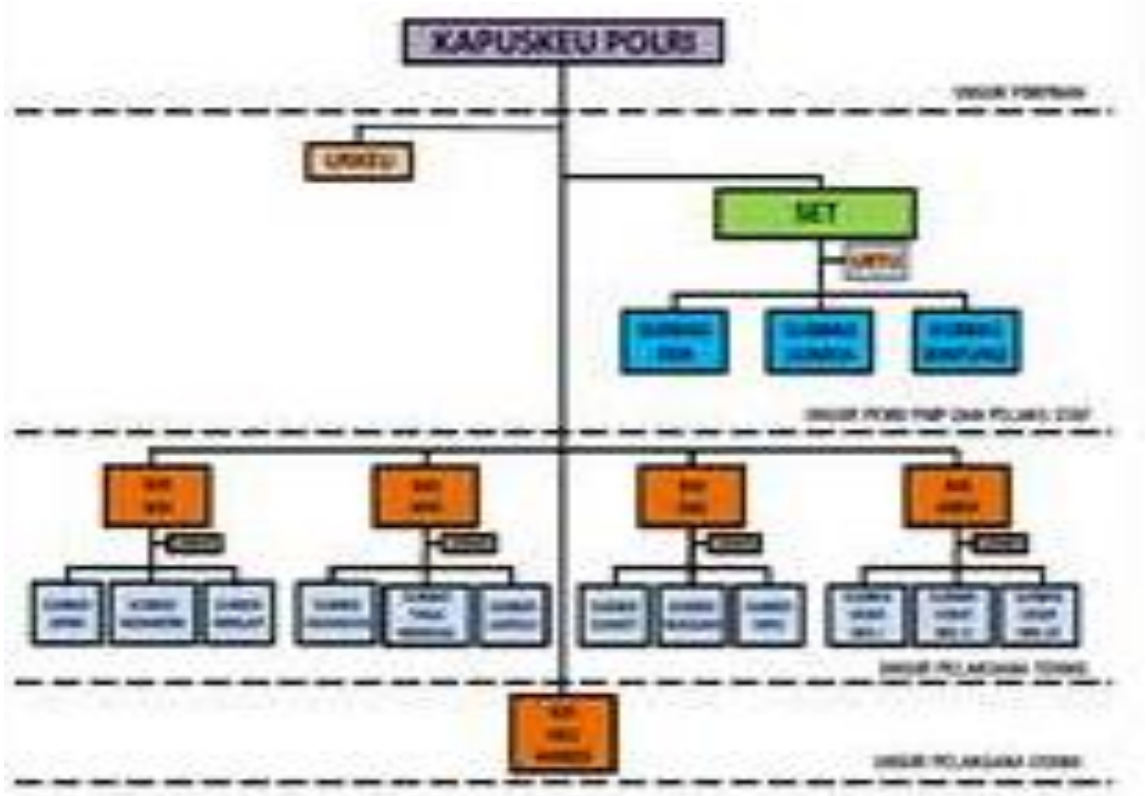


- b. Urkeu.
- c. Bidang Pembiayaan (Bidbia), terdiri dari:
  - 1) Subbidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbid APBN);
  - 2) Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbid non APBN);
  - 3) Subbidang Administrasi Laporan (Subbidminlap) dan;
  - 4) Urmin.
- d. Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan (Bid APK), terdiri dari:
  - 1) Subbidang Sistem Akuntansi (Subbidsisakun);
  - 2) Subbidang Tata Buku Manual (Subbidtabumanual);
  - 3) Subbidang Laporan Keuangan (Subbidlapkeu) dan;
  - 4) Urmin.
- e. Bidang Pengendalian (Biddal), terdiri dari:
  - 1) Subbidang Sistem dan Metoda (Subbidsismet);
  - 2) Subbidang Pengawasan Anggaran (Subbidwasgar);
  - 3) Subbidang Informasi (Subbidinfo); dan
  - 4) Urmin.
- f. Bidang Verifikasi (Bidverif), terdiri dari:
  - 1) Subbidang Verifikasi Wilayah I (Subbidverif Wil I);
  - 2) Subbidang Verifikasi Wilayah II (Subbidverif Wil II);
  - 3) Subbidang Verifikasi Wilayah III (Subbidverif Wil III) dan;
  - 4) Urmin.
- g. Bidang Keuangan Mabes (Bidkeu Mabes).

**STRUKTUR .....**



## STRUKTUR ORGANISASI PUSKEU POLRI



### D. MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud

Maksud dibuatnya laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Triwulan I T.A. 2025.

#### 2. Tujuan

Adapun tujuannya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Triwulan I T.A. 2025 ini adalah agar capaian kinerja, daya serap anggaran dapat lebih optimal

### E. DASAR

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;

2. Keputusan .....



2. Keputusan Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Kep/24/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Rencana Kerja Pusat Keuangan Polri Tahun 2025;
3. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satker Puskeu Polri T.A. 2025 Nomor : SP DIPA- 060.01.1.642381/2025 tanggal 2 Desember 2024;
4. Nota Dinas Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: B/ND-90/IV/REN.2.3./2025/Puskeu tanggal 10 April 2025 perihal permintaan data evaluasi capaian kinerja Triwulan I T.A. 2025;

#### F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembuatan laporan ini adalah evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Triwulan I T.A. 2025.

#### G. Capaian Kinerja Satker Puskeu Polri

1. Sasaran Strategis (SS) 1: Terwujudnya pengelolaan keuangan Polri yang modern, efektif, dan akuntabel.
  - a. IKU: Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Laporan Keuangan Polri

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK atas Laporan Keuangan T.A. 2023.	WTP	LK Polri <i>Unaudited</i> T.A. 2024	Belum menyatakan Opini

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan penjelasan

Undang .....



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 30 ayat (2). Penyusunan Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan penyusunan keuangan disusun dan disajikan dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan Negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 9 huruf (g).

Untuk mewujudkan Laporan Keuangan Polri yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan koordinasi dan rekonsiliasi data untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan perkembangan proses bisnis pengelolaan keuangan negara, evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, dan penerapan sistem aplikasi terintegrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Perubahan penerapan akuntansi dari berbasis kas menjadi berbasis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari reformasi dibidang keuangan Negara yang dilaksanakan secara bertahap, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Puskeu Polri bertekad mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan indikator atas Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara serta merupakan apresiasi terhadap seluruh Laporan Keuangan Satker di Lingkungan Polri yang diwadahi dalam Laporan Keuangan Polri. Apabila dibandingkan antara target kinerja tahun 2025 dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2025, Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan untuk Laporan Keuangan Polri (LK) Tahun 2024 belum mencapai .....



mencapai target hal ini dikarenakan sesuai dengan pasal 20 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada Triwulan I T.A. 2025 ini capaian Indikator Kinerja Utama Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri T.A. 2024 masih dalam proses *Audited* , sehingga BPK R.I. belum menyatakan Opini terhadap Laporan Keuangan Polri, Opini BPK R.I. terhadap LK Polri Tahun 2024 baru akan disampaikan pada bulan Mei s.d. awal Juni Tahun 2025 sesuai dengan waktu pengukuran sebagai berikut :

NO	URAIAN	BULAN PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semester Tahun Anggaran Berjalan (TAB)	Juli TAB	Laporan Keuangan Semester I
2	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) TAB	September TAB	PDTT BPK
3	Penyusunan Laporan Keuangan TRIWULAN III TAB	Oktober TAB	Laporan Keuangan TRIWULAN III
4	Interim	November TAB	BPK
5	Penyusunan Laporan Tahunan TAB	Februari TAB+1	Laporan Keuangan Unaudited
6	Rekonsiliasi data antara BPK, Kemenkeu dan Polri	April TAB+1	Tripartied
7	Penyusunan Laporan Keuangan Polri Perbaikan	Mei TAB+1	Laporan Keuangan Audited
8	Penentuan Opini	Mei s.d. Juni TAB+1	BPK

- b. IKP 1: Persentase Laporan Keuangan Satker Jajaran Mabes dan Wilayah yang Tepat Saji

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Persentase Laporan Keuangan Satker Jajaran Mabes dan Wilayah yang Tepat Saji	92%	75%	81,5%

Persentase .....



Persentase Laporan Keuangan Satker Jajaran Mabes dan Wilayah yang Tepat Saji pada Triwulan I realisasi sebesar 75% dengan keterangan bahwa terdapat 75 Laporan keuangan yang telah di nyatakan tepat saji dari 100 Laporan keuangan yang di laporkan, beberapa kegiatan telah dilakukan oleh Bid APK, Bidkeu I dan Bidkeu II dalam penyusunan Laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyusunan Laporan keuangan BLU Polri Tahun 2025;



- 2) Laporan Keuangan Polri periode T.A. 2024 Unaudited (CaLK dan Laporan Keuangan Pendukung) ;



- 3) Penyusunan .....



3) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bidkeu Mabesl dan II Puskeu Polri Tingkat Wilayah (UAPPA-W)TA. 2024 Unaudited.



4) Penyerahan laporan keuangan Polri ke BPK RI dan Kemenkeu ;



5) Membuat .....

- 5) Membuat Bijak akuntansi dan langkah-langkah penyusunan laporan keuangan Polri dengan nomor surat B/216/I/KEU./2025/Puskeu Tanggal 8 Januari 2025 hal Langkah-langkah penyusunan dan penyajian laporan keuangan Polri Tahun 2024 *unaudited*.

Pada periode penyusunan Laporan Keuangan T.A. 2024 *Unaudited* terdapat beberapa permasalahan yang masih belum sesuai dengan Bijak akuntansi yang tertuang pada Surat Kapolri tanggal 8 Januari 2025 Perihal Langkah-langkah penyusunan dan penyajian laporan keuangan Polri Tahun 2024 *Unaudited*. Permasalahan tersebut antartara yaitu:

- 1) Terdapat pengesahan belanja hibah yang *overstated*;
- 2) Salah pencatatan transaksi keuangan;
- 3) Terdapat persediaan yang belum diinput;
- 4) Terdapat pencatatan utang kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan dokumen sumber;
- 5) Terdapat selisih kuantitas tanah yang tidak sesuai dengan CRBMN. Permasalahan tersebut masih harus ditindaklanjuti pada penyusunan Laporan keuangan Polri T.A. 2024 *Audited*, dengan melakukan Langkah – Langkah sebagai berikut:
  - 1) Melakukan koreksi data saldo awal, pembelian APBN, transfer, hibah, atau reklasifikasi;
  - 2) Melakukan analisa dan evaluasi pada menu monitoring resiprokal aplikasi MonSakti untuk disajikan dalam CaLK;
  - 3) Berkoordinasi dengan Dit. SITP Kemenkeu melalui Hai DJPB;
  - 4) Berkoordinasi dengan KPPN Mitra Kerja Satker, Kanwil dan memberikan arahan ke Satker jajaran agar mematuhi jadwal tutup periode sesuai dengan Per-8 Tahun 2023 (paling lambat H+15);
  - 5) Melakukan identifikasi saldo sesuai dengan pos saldo Kas (debit), Aset (debit) , Akumulasi penyusutan (kredit), Pendapatan (kredit) dan Beban (debit).

6) Terselenggaranya .....



- 6) Terselenggaranya penjaminan akurasi dan kualitas hasil verifikasi penyajian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara profesional.
2. Sasaran Strategis (SS) 2 : Terselenggaranya penjaminan akurasi dan kualitas hasil verifikasi penyajian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara profesional.
- a. IKP2 : Jumlah NPHPW yang diterbitkan di lingkungan Polri

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Jumlah NPHPW yang diterbitkan di lingkungan Polri	280	0	0%

Jumlah NPHPW yang diterbitkan di lingkungan Polri sampai dengan TW I belum terealisasi hal ini di karenakan Bid verif, Bidkeu I dan Bidkeu II masih dalam proses Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen Belanja Barang/Modal yang nilai tagihannya di atas 500 juta, namun masih banyak Satker jajaran tidak mengunggah dokumen belanja barang/modal pada Aplikasi Puskeu Presisi dokumen kelengkapan Perwabkeu sesuai dengan ketentuan (H+20) setiap bulannya.

No	Aksi	No Revisi	Uraian	Mod Uraian	Mod Revisi	Revisi	Jumlah	Status	Status Verifikasi (Dokumen/Barang)
1	Detail	SPH00000000000000000000	PERAKSIAN BAKU PERALIHANAN (SAR OPERASIONAL) BENCORAKAS (MORNO) JALAN BAKU BOKA 2 KOLAMATA POLRI T.A. 2020	000	0000000000	0	000	Belanja Barang	Belanja
2	Detail	SPH00000000000000000000	PERAKSIAN BAKU PERALIHANAN (SAR OPERASIONAL) KENDARAAN (MORNO) JALAN BAKU BOKA 2 KOLAMATA POLRI T.A. 2020	000	0000000000	0	000	Belanja Barang	Belanja
3	Detail	SPH00000000000000000000	PERALIHANAN BAKU PERALIHANAN (SAR OPERASIONAL) BENCORAKAS (MORNO) JALAN BAKU BOKA 2 KOLAMATA POLRI T.A. 2020	000	0000000000	0	000	Belanja Barang	Belanja
4	Detail	SPH00000000000000000000	PERALIHANAN BAKU PERALIHANAN (SAR OPERASIONAL) BENCORAKAS (MORNO) JALAN BAKU BOKA 2 KOLAMATA POLRI T.A. 2020	000	0000000000	0	000	Belanja Barang	Belanja
5	Detail	SPH00000000000000000000	PERALIHANAN BAKU PERALIHANAN (SAR OPERASIONAL) BENCORAKAS (MORNO) JALAN BAKU BOKA 2 KOLAMATA POLRI T.A. 2020	000	0000000000	0	000	Belanja Barang	Belanja
6	Detail	SPH00000000000000000000	PERALIHANAN BAKU PERALIHANAN (SAR OPERASIONAL) BENCORAKAS (MORNO) JALAN BAKU BOKA 2 KOLAMATA POLRI T.A. 2020	000	0000000000	0	000	Belanja Barang	Belanja
7	Detail	SPH00000000000000000000	PERALIHANAN BAKU PERALIHANAN (SAR OPERASIONAL) BENCORAKAS (MORNO) JALAN BAKU BOKA 2 KOLAMATA POLRI T.A. 2020	000	0000000000	0	000	Belanja Barang	Belanja
8	Detail	SPH00000000000000000000	PERALIHANAN BAKU PERALIHANAN (SAR OPERASIONAL) BENCORAKAS (MORNO) JALAN BAKU BOKA 2 KOLAMATA POLRI T.A. 2020	000	0000000000	0	000	Belanja Barang	Belanja

Detail .....



**DETAIL VERIFIKASI**  
KONTRAKTUAL

PUSKEU: VERIFIKASI KONTRAKTUAL

Pilih: Puskesmas | POLDA RAO | Sahat | SIKREK - KOLONG POLDA RAO

111 Data

No	Akter	No Kontrak	Uraian	Mes. Lingk	Nilai Kontrak	Realisasi	Jumlah	Status	Status Verifikasi Data (Jumlah)
1	SP020-KATAKONG0200POLDA RAO	PKMKT 1 KAPOR	OK	8.890.900,00	0	0,00	0,00	Belum Diverifikasi	Belum
2	SP100-KATAKONG0200POLDA RAO	PKMKT 2 SENGU	OK	8.920.670,00	0	0,00	0,00	Belum Diverifikasi	Belum
3	SP100-KATAKONG0200POLDA RAO	BAJU CLAY RADA PKMKT 3 KAPOR	OK	4.224.840,00	0	0,00	0,00	Belum Diverifikasi	Belum
4	SP020-KATAKONG0200POLDA RAO	PKMKT 4 KAPOR	OK	8.890.900,00	0	0,00	0,00	Belum Diverifikasi	Belum
5	SP020-WONOREJO0200POLDA RAO	Pertanggung jawaban dan laporan keuangan pemeriksaan barang	OK	1.000.000,00	0	0,00	0,00	Belum Diverifikasi	Belum
6	SP020-WONOREJO0200POLDA RAO	BARU KOTAMUKA	OK	5.000.000,00	0	0,00	0,00	Belum Diverifikasi	Belum
7	SP020-WONOREJO0200POLDA RAO	PENGADUAN HONORARIUS BENGKALIS	OK	1.000.000,00	0	0,00	0,00	Belum Diverifikasi	Belum
8	SP020-WONOREJO0200POLDA RAO	PENGADUAN HONORARIUS BENGKALIS	OK	2.287.287,44	0	0,00	0,00	Belum Diverifikasi	Belum
9	SP020-WONOREJO0200POLDA RAO	PENGADUAN HONORARIUS BENGKALIS	OK	4.948.888,88	0	0,00	0,00	Belum Diverifikasi	Belum

Adapun Upaya untuk mengatasi hambatan yang telah dilakukan oleh Puskeu Polri sebagai berikut:

- 1) Puskeu Polri telah membuat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/104/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang target Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban keuangan kontraktual Belanja barang dan / atau belanja modal dengan nilai diatas 500 juta di Lingkungan Polri;
- 2) Melaksanakan Monev, monitoring dan evaluasi belanja barang dan modal bidang Verifikasi serta verifikasi bagi kasubbid dal/verif di Lingkungan Polri T.A. 2025 tanggal 16 s.d. 19 Februari 2025.



Foto .....





- b. IKP3: Persentase Efektivitas Penerapan PIPK pada Satker di lingkungan Polri yang memperoleh penilaian Efektif atau Efektif Dengan Pengecualian

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Persentase Efektivitas Penerapan PIPK pada Satker di lingkungan Polri yang memperoleh penilaian Efektif atau Efektif Dengan Pengecualian	15%	0%	0%

Capaian Indikator Persentase Efektivitas Penerapan PIPK pada Satker di lingkungan Polri yang memperoleh penilaian Efektif atau Efektif Dengan Pengecualian s.d. TW I belum terealisasi, hal ini dikarenakan belum adanya penilaian kertas kerja Akun Signifikan, dengan Melakukan penilaian Tabel A, Menetapkan Akun Signifikan dan Tabel A, Mengkompilasi Tabel E wilayah. Dalam penilaian PIPK Masih ditemukan kurangnya pemahaman SDM tentang pentingnya PIPK, namun Puskeu Polri secara berkala Memonitor proses penilaian penerapan PIPK pada tingkat Satker dan wilayah, dan juga Melaksanakan Anev serta Bintek PIPK dan FGD penerapan dan penilaian PIPK. Adapun Timeline pelaksanaan PIPK sebagai berikut :

NO .....



NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	1 s.d. 31 September 2025	Tim penerap menggugah dokumen pendukung tabel A dan faktor-faktor yang dinilai pada aplikasi Puskeu Presisi
2	1 Oktober s.d. 8 November 2025	Tim penilai melaksanakan penilaian pada table B1, C1 dan D pada aplikasi Puskeu Presisi
3	20 s.d. 31 November 2025	Tim penilai wilayah mengkompilasi laporan hasil penilaian (LHP) dan menarik kesimpulan atas nilai PIPK Satker jajaran pada aplikasi Puskeu Presisi
4	1 s.d. 23 Desember 2025	Tim penilai pusat mengkompilasi laporan hasil penilaian (LHP) dan menarik kesimpulan atas nilai PIPK Satker jajaran pada aplikasi Puskeu Presisi
5	24 Desember 2025	Tim penilai pusat mengirimkan table E Pusat dan laporan hasil kompilasi penilaian LKHP PIPK Pusat ke Itwasum Polri
6	Januari 2026	Tim penilai pusat mengirimkan table E Pusat dan laporan hasil kompilasi penilaian LKHP PIPK oleh Itwasum Polri untuk dikirimkan ke Kemenkeu.

3. Sasaran Strategis (SS) 3: Terwujudnya kesesuaian administrasi pembiayaan yang modern, transparan, dan akuntabel.

a. IKP4 : Persentase Penyelesaian TKTM

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Persentase Penyelesaian TKTM	100%	20%	20%

Realisasi .....



Realisasi Persentase Penyelesaian TKTM s.d. TW I sebesar 20%, dengan rincian dari target 10 TKTM pada tahun 2025 sudah di selesaikan 2 TKTM, sesuai dengan surat Kapuskeu Polri Nomor : B / 2868 / II / KEU. / 2025 Puskeu tanggal 10 Februari 2025 tentang penyampaian ADK Transaksi Transfer Keluar (TK) pada aplikasi SAKTI. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai Berikut:

- 1) Penyelesaian Administrasi SP3 atas pembiayaan PLN dan PDN;
- 2) Permintaan Data Aset BMN hasil pengadaan kepada Satker pelaksana;
- 3) Pelaksanaan rapat penyusunan Kertas Kerja data TKTM bersama Stamarena Polri, Slog Polri, PPK, Operator Sakti Satker pelaksana dan pihak penyedia;
- 4) Pelaksanaan uji petik pencocokan dan penelitian Aset BMN yang telah didistribusikan dan digunakan oleh user/satker pengguna;
- 5) Pelaksanaan Transfer Keluar kepada Satker pengguna berdasarkan data yang disampaikan oleh Satker pelaksana;
- 6) Pelaksanaan Monitoring berkala terhadap transaksi TKTM.

4. Sasaran Strategis (SS) 4: Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Keuangan Satker Mabes dan Wilayah.

a. IKP5 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri	95,25	99,58	104,54%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sesuai Dengan : MARET

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
				Revisi DiPA	Deviasi Halaman III DiPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Konstruktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	000	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.30	99.58	100%	0.00	99.58
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
			Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	24.58					
			Nilai Aspek	100.00		100.00				98.30					

Pada .....



Pada Triwulan I Tahun 2025 nilai sementara Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Polri sebesar 99,58 Apabila dibandingkan antara target kinerja tahun 2025 sebesar 95,25 maka target capaian sudah terlampaui yaitu sebesar 104,54%. Namun demikian bukan berarti nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Polri tercapai realisasi pada Triwulan I Tahun 2025 merupakan nilai kinerja anggaran yang sifatnya sementara sedangkan target capaian nilai kinerja anggaran merupakan nilai akhir pada tahun anggaran berjalan. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam Upaya mempertahankan nilai IKPA yaitu Membuat Surat Kapolri Nomor: B/527/I/KEU./2025/ Puskeu tanggal 10 Januari 2025 perihal Mitigasi Dalam rangka Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025.

b. IKP6 : Pencapaian target jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA  $\geq$  93,75

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Pencapaian target jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA $\geq$ 93,75	80%	33,56%	41,95%

Sampai dengan TW I Pencapaian target jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA  $\geq$  93,75 sebesar 33,56% dari target 80% maka capaian pada TW I sebesar 41,95% dengan perhitungan dari 1445 Satker terdapat 485 mendapatkan nilai IKPA  $\geq$  93,75 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kategori Sangat Baik=454 Satker (31,41%);
- 2) Kategori Baik=90 Satker (6,22%);
- 3) Kategori Cukup= 667 Satker (46,15%);
- 4) Kategori Kurang=243 Satker (16,81%).

namun demikian capaian penilaian IKPA akan terus berubah sampai akhir tahun anggaran berjalan.

Pada saat ini terdapat pengembangan aplikasi Sakti yang berdampak terhadap pelayanan Satker pada periode 2025 yang mempengaruhi pada Indikator Kinerja pada IKPA, serta Pelaporan data target atau proyeksi capaian output periode 1 dan Triwulan II Tahun 2025 .....



2025 secara terpusat dimulai dari tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan 30 April 2025. Kegiatan yang telah dilakukan Puskeu Polri yaitu pelaksanaan Kegiatan Anev IKPA Polri T.A. 2024 yang diikuti oleh 34 Bidkeu Polda dan 2 Bidkeu Mabes dengan mengundang Narasumber dari Kanwil DJPB Kemenkeu RI pada kegiatan Anev IKPA Polri T.A. 2024 dengan materi optimalisasi deviasi hal III DIPA dan optimalisasi capaian output;



## 5. Sasaran .....



5. Sasaran Strategis (SS) 5: Tata kelola Puskeu Polri yang bersih, transparan dan akuntabel.

a. IKP7 : Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu Polri.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu Polri	80,1 (A)	-	-

Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu Polri s.d. TW I Belum ada realisasi dikarenakan belum ada penilaian dari tim evaluator APiP.

b. IKP8 : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Puskeu Polri.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Puskeu Polri	76,5	-	-

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan Hasil penilaian kinerja perencanaan anggaran (bobot 50%) dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (bobot 50%) dalam menilai keberhasilan pelaksanaan anggaran satuan kerja.

Sampai dengan TW I penilaian kinerja perencanaan anggaran belum dapat di lihat pada aplikasi e-monev Kemenkeu, sedangkan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran sudah dapat dilihat pada aplikasi OMSPAN, sehingga s.d. TW I Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Puskeu Polri belum terdapat realisasi namun demikian Puskeu Polri telah melakukan Anev Kinerja dan anggaran secara berkala per triwulan untuk dapat meningkatkan NKA Satker Puskeu Polri.



Foto .....





- c. IKP9: Presentase SDM Fungsi Keuangan yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Keuangan.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Presentase SDM Fungsi Keuangan yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Keuangan	60%	-	-

Presentase SDM Fungsi Keuangan yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Keuangan s.d. TW I belum terdapat realisasi, hal ini dikarenakan Kegiatan Diklat sertifikasi Bendahara akan dilaksanakan pada bulan Agustus, dan saat ini sedang dilakukan proses pengecekan data berkoordinasi dengan Bidkeu Polda.

- d. IKP10: Indeks Profesionalitas SDM Puskeu Polri.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Indeks Profesionalitas SDM Puskeu Polri	60%	-	-

Sampai .....



Sampai dengan TW I Indeks Profesionalitas SDM Puskeu Polri belum terdapat realisasi, dikarenakan pengisian komponen penilaian dilaksanakan per Semester dan penilaian baru akan terlihat pada akhir semester I dan II Tahun 2025

- e. IKP11: Jumlah Pelaksanaan Anev Terhadap Dokumen Pembinaan Fungsi di Lingkungan Puskeu Polri

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Jumlah Pelaksanaan Anev Terhadap Dokumen Pembinaan Fungsi di Lingkungan Puskeu Polri	4	-	-

Jumlah Pelaksanaan Anev Terhadap Dokumen Pembinaan Fungsi di Lingkungan Puskeu Polri s.d. TW I blm terdapat realisasi, dan akan dilaksanakan pada bulan Juli.

#### H. Target Capaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme pada Satker Puskeu Polri maka disusun target kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	%
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan Puskeu Polri yang modern, efektif, dan akuntabel.	<b>IKU</b> Opini BPK atas Laporan Keuangan Puskeu Polri.	WTP	LK Puskeu Polri <i>Unaudited</i> T.A. 2024	Belum menyatakan Opini
		<b>IKP 1</b> Persentase Laporan Keuangan Satker Jajaran Mabes dan Wilayah yang Tepat Saji	100%	75%	75%

No .....



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	%
2	Terselenggaranya penjaminan akurasi dan kualitas hasil verifikasi penyajian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara profesional.	<b>IKP2</b> Jumlah NPHPW yang diterbitkan di lingkungan Polri	280	-	0%
		<b>IKP3</b> Persentase Efektivitas Penerapan PIPK pada Satker di lingkungan Polri yang memperoleh penilaian Efektif atau Efektif Dengan Pengecualian	15%	-	0%
3	Terwujudnya kesesuaian administrasi pembiayaan yang modern, transparan, dan akuntabel.	<b>IKP4</b> Persentase Penyelesaian TKTM	100%	20%	20%
4	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Keuangan Satker Mabes dan Wilayah.	<b>IKP5</b> Nilai IKPA Polri	95,25	99,58	104,54%
		<b>IKP6</b> Persentase Jumlah Satker Polri dengan Nilai IKPA $\geq$ 93,75	80%	33,56%	41,95%

No .....




No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	%
5	Tata kelola Puskeu Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.	<b>IKP7</b> Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu Polri	80,1 (A)	-	0%
		<b>IKP8</b> Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Puskeu Polri	76,5	-	0%
		<b>IKP9</b> Presentase SDM Fungsi Keuangan yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Keuangan	60%	-	0%
		<b>IKP10</b> Indeks Profesionalitas SDM Puskeu Polri	71	-	0%
		<b>IKP11</b> Jumlah Pelaksanaan Anev Terhadap Dokumen Pembinaan Fungsi di Lingkungan Puskeu Polri	4	-	0%

## I. PENUTUP

Demikian pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri TW I T.A. 2025 disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi.

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh:</p> <p><b>LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.</b> BRIGADIR JENDERAL POLISI</p>
--	--

